

Hasil Penelitian

SEKTOR BASIS DI KABUPATEN BLITAR, JAWA TIMUR: ANALISIS PDRB KABUPATEN BLITAR TAHUN 2010-2016

(SECTOR BASE IN BLITAR REGION, EAST JAVA: ANALYSIS OF GROSS DOMESTIC PRODUCT BLITAR REGION 2010-2016)

Kristian Budi T.

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur
Jl. Gayung Kebonsari 56 Surabaya
Email: k_buditiawan@yahoo.com

Diterima: 17 Oktober 2018; Direvisi: 26 Februari 2019; Disetujui: 18 April 2019

ABSTRAK

Terjadi ketimpangan yang mencolok antara kawasan utara dan kawasan selatan Jawa Timur jika dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi. Kawasan utara telah memiliki infrastruktur yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan kawasan utara, kawasan selatan Jawa Timur belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga perkembangan perekonomiannya cenderung lebih lambat. Penyebab ketertinggalan wilayah selatan disebabkan oleh kondisi geografis kawasan tersebut terutama Kabupaten Blitar, yang merupakan pegunungan kapur yang kondisinya kering dan miskin sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Penelitian ini bertujuan mengetahui sektor basis, mengetahui lapangan usaha yang memiliki daya saing, dan mengetahui struktur perekonomian di Kabupaten Blitar periode 2010-2016. Teknik analisa yang digunakan adalah Analisa Location Quotient (LQ), Analisa Dynamic Location Quotient (DLQ), dan Analisa Shift-Share. Hasil penelitian ini adalah sektor basis di Kabupaten Blitar meliputi pertanian, kehutanan, dan perikanan; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Lapangan usaha yang memiliki daya saing adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi. Struktur perekonomian Kabupaten Blitar dalam rentang waktu 2010-2016 ditopang oleh empat lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan konstruksi.

Kata kunci: sektor basis, daya saing, LQ, DLQ, shift-share

ABSTRACT

There is a striking inequality between the northern region and the southern region of East Java. The northern region has an infrastructure that is able to lift economy up. Unlike the northern region, the southern region of East Java does not have adequate infrastructure so that the economy development tends to be slower. The reason is mostly caused by the geographical conditions of the region, especially Blitar district, which is hilly and rocky, barren and arid. This study aims to find out the base sector, to know the business fields that have competitiveness, and to know the structure of the economy in Blitar Regency 2010-2016 period. The analysis technique used is Location Quotient Analysis (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ) Analysis, and Shift-Share Analysis. The results of this study are the base sectors in Blitar Regency covering agriculture, forestry and fisheries; information and communication; real estate; government administration, defense and compulsory social security; education services; and health services and social activities. Business fields that have competitiveness are: agriculture, forestry and fisheries; mining and excavation; wholesale and retail trade, car and motorcycle repair; and financial and insurance services. The economic structure of Blitar Regency in the period 2010-2016 is supported by four business fields, there are: agriculture, forestry and fisheries; wholesale and retail trade, car and motorcycle repair; processing industry; and construction.

Keywords: base sector, competitiveness, LQ, DLQ, shift-share

PENDAHULUAN

Buku PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016 menyebutkan bahwa kabupaten/kota di Jawa Timur berperan dalam menghasilkan nilai tambah perekonomian. Pada tahun 2016 menghasilkan nilai tambah atas harga berlaku sebesar Rp. 1.855,04T, dan atas harga konstan tahun 2010 sebesar Rp. 1.405,24, sumbangan terhadap APBN sebesar 14,65%. Sumbangan terbesar terhadap perekonomian Jawa Timur diperoleh dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 60,24% pada tahun 2016. Lapangan usaha konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang terbesar berikutnya dalam pembentukan PDRB Jawa Timur, masing-masing sebesar 9,69% dan 5,66% (Gambar 1).

Berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi, terjadi ketimpangan yang mencolok antara kawasan utara dan kawasan selatan Jawa Timur (Huda dan Eko, 2014). Kawasan utara telah memiliki infrastruktur yang mampu mengangkat perekonomian masyarakat di sekitarnya. Berbeda dengan kawasan utara, kawasan selatan Jawa Timur belum memiliki infrastruktur yang memadai sehingga perkembangan perekonomiannya cenderung lebih lambat jika dibandingkan dengan kawasan utara maupun Provinsi Jawa Timur (Hamid, 2014).

Keberadaan kawasan industri saat ini berada di kawasan utara Jawa Timur, seperti: PT. Maspion Industrial Estate (MIE) di Kabupaten Gresik; PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) di Kota Surabaya; dan PT. Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER) di Kabupaten Pasuruan. Perusahaan-perusahaan tersebut berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi (Julianto, 2016).

Kontur geografis yang berbukit menghambat pembangunan aksesibilitas jalan yang merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian (Sukwika, 2018). Kesenjangan antarwilayah yang ditimbulkan juga relatif besar, wilayah yang memiliki sumber daya alam melimpah yang didukung oleh industri pengolahan memiliki kinerja perekonomian yang lebih baik. Hal ini berimbas pada nilai PDRB pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, ada beberapa wilayah yang memiliki pertumbuhan PDRB tinggi namun sebaliknya di wilayah yang lain (Santosa, 2015). Perkembangan perekonomian di Jawa Timur selalu berubah setiap waktu/dinamis. Perubahan keadaan perekonomian Jawa Timur lebih disebabkan oleh

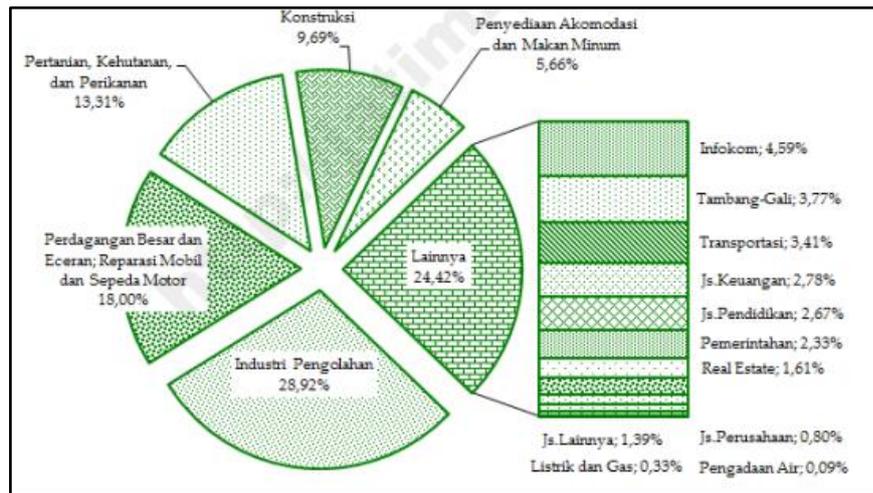
kinerja sektor maupun subsektor lapangan usaha yang menjadi roda penggeraknya (Qomariyah dkk, 2018).

Sembilan kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, dimana tiga diantaranya berada di kawasan selatan Jawa Timur, yaitu: Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Jember; Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Mojokerto; Kabupaten Gresik; Kota Malang; Kota Pasuruan; Kota Madiun; dan, Kota Batu. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Kabupaten Bojonegoro (kawasan utara Jawa Timur) sebesar 21,95%. Delapan kabupaten yang berada di sisi selatan Jawa Timur mampu berkontribusi sebesar 17,43% dari total keseluruhan kabupaten/kota pembentuk PDRB Jawa Timur atas harga berlaku pada tahun 2016. Angka tersebut jauh dibawah kontribusi kabupaten/kota di sisi utara Jawa Timur yang meskipun hanya 5 (lima) kabupaten/kota namun mampu berkontribusi sebesar 38,92% terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2016 (Hamidah dkk, 2017).

Penyebab ketertinggalan wilayah selatan disebabkan oleh kondisi geografis kawasan tersebut terutama Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Blitar, yang merupakan pegunungan kapur yang kurang mendukung pertanian namun di sisi yang lain masyarakatnya bekerja sebagai petani (Sholikhah, 2013). Penyebab timbulnya ketimpangan selain perbedaan ketersediaan sumber daya alam adalah infrastruktur, investasi, angkatan kerja dan indeks pembangunan manusia (Iswanto, 2015) (Islami, 2018).

Berdasarkan buku Seri Analisis Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, disebutkan bahwa ada 3 (tiga) isu strategis yang menjadi titik perhatian pembangunan di Jawa Timur. Salah satunya adalah "kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan". Pembangunan ekonomi yang mengandalkan sumber daya alam wajib memperhatikan aspek pelestarian lingkungan, memberikan manfaat yang secara terus-menerus sama bagi tiap generasi, menyeimbangkan aktifitas manusia dengan kapasitas sumber daya alam yang menjadi sandarannya (Burhanuddin, 2016).

Pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh komoditas unggulan yang ada di tiap wilayah. Setiap wilayah memiliki keunggulan komparatif yang secara cepat dapat dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan sumber daya yang memadai dapat mendorong tumbuhnya investasi pembukaan lapangan kerja baru (Yulianto dan Eko, 2013).



Gambar 1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Provinsi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha 2012-2016
 Sumber: BPS Jawa Timur (2018)

Tabel 1. Potensi Unggulan di Jawa Timur (berdasarkan PDRB Jawa Timur Tahun 2016)

No.	Potensi	Kabupaten	Kontribusi (Rp. M)
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Probolinggo	246,981.64
2.	Industri Pengolahan	Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik	536,473.93
3.	Konstruksi	Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto	179,816.56
4.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kota Malang	333,996.36
5.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Kota Surabaya	104,983.22
6.	Jasa lainnya	Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan	246,981.64

Sumber: BPS Jawa Timur (2018)

Keberagaman potensi dan daya tarik investasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan

(*sustainability*) untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan (Pratiwi dkk, 2018). Peningkatan kinerja perekonomian wilayah melalui sektor unggulan tidak serta-merta meninggalkan potensi sektor ekonomi

lainnya. Sektor yang tidak menjadi unggulan tetap diperhatikan sebab pembangunan di satu sektor akan mempengaruhi sektor lainnya. Dibutuhkan perencanaan yang matang dan komprehensif dalam menata pembangunan ekonomi di daerah (Husna dkk, 2013).

Jawa Timur merupakan salah satu penggerak ekonomi Indonesia. Jawa Timur merupakan basis industri dan agrobisnis, sehingga pengembangan kawasan menjadi penting bagi perekonomian nasional. Dengan kondisi ekonomi nasional yang kurang menjanjikan, maka Jawa Timur bagian selatan cukup prospektif untuk dikembangkan sebagai motor penggerak perekonomian. Sayangnya pertumbuhan kawasan pesisir selatan hingga kini masih kalah dibandingkan dengan kawasan utara. Padahal kawasan selatan menyimpan potensi sumber daya alam dan sumberdaya kelautan yang relatif besar. Potensi ini tersebar di sepanjang pesisir kabupaten, yaitu Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi.

Jawa Timur memiliki potensi sektor perikanan tangkapan sebesar 1,7 juta ton per tahun dengan potensi lestari 804.612,8 ton per tahun, tapi baru dimanfaatkan 453.034,05 ton per tahun atau 56,30% saja dari potensi yang ada. Total tangkapan itu sebagian besar (sekitar 87,98%) diperoleh dari usaha penangkapan di kawasan pantai utara, sisanya (12,12%) didapat dari penangkapan di pantai selatan (Samudera Indonesia). Perikanan budidaya, potensi yang dimiliki wilayah pantai selatan cukup besar. Budidaya air payau produksinya dapat mencapai 1,5 ton/ha/musim tanam, air tawar 16 ton/ha/musim tanam dan budidaya laut 7,5 kg/m³/musim tanam (Lukito, 2008). Kawasan selatan menyimpan potensi yang dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat menyejahterakan masyarakat di selatan Jawa Timur yang selama ini selalu tertinggal dari kawasan utara Jawa Timur (Hamid, 2014).

Cahyono (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Sub DAS Bengawan Solo Hulu" menyimpulkan bahwa masing-masing wilayah memiliki sektor unggulan yang berbeda sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan keunggulan komparatif yang dimiliki. Kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan pengembangan sektor unggulan secara inklusif dan memperhatikan perubahan arah kebijakan ekonomi nasional yang berdampak pada setiap wilayah yang ada.

Wilsonoyudho (2009) dalam penelitiannya yang berjudul "Kesenjangan dalam

Pembangunan Wilayah" menyimpulkan bahwa daerah-daerah yang mengalami perlambatan pertumbuhan harus dipacu dengan konsep *networking* yang erat yang melibatkan segenap stakeholder yang ada wilayah tersebut, menggerakkan seluruh elemen kelembagaan (*triple helix concept*) baik pemerintah (*government*), dunia pendidikan (*academia*), dan sektor swasta (*private*).

Sutikno, dkk (2007) dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang". Hasil penelitian menunjukkan 7 (tujuh) satuan wilayah pengembangan di Kabupaten Malang. Karakteristik ketujuh wilayah ini berbeda satu dengan lainnya, sebab masing-masing memiliki potensi dan permasalahan sendiri. Penentuan ketujuh wilayah tersebut menggunakan analisis Tipologi Kelas, *Location Quotient* (LQ), *Shift-Share* (S-S), Analisis Scalogram, dan Analisis Daya Saing sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan potensi dari masing-masing wilayah yang dapat dikembangkan.

Perekonomian suatu daerah dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya alam dan ketersediaan faktor produksi dan aktifitas untuk mengusahakan faktor-faktor produksi tersebut (Wahyudi dkk, 2014). Kabupaten Blitar dalam Angka Tahun 2017 menyebutkan bahwa perkembangan PDRB Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Blitar periode tahun 2012-2016 selalu mengalami peningkatan, kurang lebih sebesar 4,9% per tahun. Kontributor PDRB Kabupaten Blitar terutama dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 35,51%; kemudian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 17,44%; Industri Pengolahan sebesar 12,88%; dan Konstruksi sebesar 9,23%, sementara peranan sektor yang lain kontribusinya di bawah 5%.

Pembangunan ekonomi wilayah merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi ekonomi sehingga mempunyai daya saing dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan prioritas pembangunan, pengembangan perekonomian lokal, pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja pada sektor unggulan pada wilayah tersebut (Wiratama dkk, 2018). Penelitian ini bertujuan mengetahui sektor basis, mengetahui lapangan usaha yang memiliki daya saing, dan mengetahui struktur perekonomian Kabupaten Blitar periode 2010-2016.

Penelitian tentang sektor basis sudah banyak dilakukan dengan beragam kesimpulan didapat namun sektor basis ini bukanlah suatu hal yang bersifat statis namun berubah-ubah

sesuai dengan perkembangan perekonomian di masyarakat. Penelitian kali ini akan menemukan sektor basis yang *up to date*. Penelitian Diharapkan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh *stakeholder* terkait dalam merumuskan kebijakan ekonomi di wilayahnya (kebijakan berbasis riset) (Kasanah, 2017).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan sumber data sekunder, disebut dengan penelitian kuantitatif karena data yang digunakan berupa data angka (kontribusi lapangan usaha PDRB) (Sugiyono, 2008). Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Blitar selama bulan April-September 2018. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literature terutama untuk mendapatkan data kuantitatif (PDRB Kabupaten Blitar, PDRB Provinsi Jawa Timur) pada instansi terkait seperti BPS Kabupaten Blitar, Bappeda Kabupaten Blitar.

Analisis yang digunakan untuk menentukan sektor basis di Kabupaten Blitar adalah Analisis *Location Quotient* (LQ). Rumus yang digunakan adalah:

$$LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/RV_j}{X_i/RV} \text{ atau } LQ_{ij} = \frac{X_{ij}/X_i}{RV_j/RV}$$

Keterangan:

LQ_{ij} = indeks/koeffisien *Location Quotient* sektor I di kab/kota j

X_{ij} = PDRB sektor I di kab/kota j

X_i = PDRB sektor I di provinsi (acuan)

RV_j = total PDRB kab/kota j

RV = total PDRB provinsi

Sumber: Muta'ali (2015)

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) digunakan untuk menentukan sektor yang prospek dikembangkan di masa yang akan datang. Rumus yang digunakan adalah:

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{1 + g_{ij}/1 + g_j}{1 + G_i/1 + G} \right]^t$$

Keterangan:

DLQ = Indeks DLQ

g_{ij} = rata-rata laju pertumbuhan sektor atau subsektor i di Kabupaten j

g_j = rata-rata laju pertumbuhan di Kabupaten j

G_i = rata-rata laju pertumbuhan sektor atau subsektor i di tingkat provinsi/nasional

G = rata-rata laju pertumbuhan di tingkat provinsi/nasional

t = kurun waktu analisis

Sumber: Muta'ali (2015)

Analisis Shift-Share (SS) dapat digunakan untuk menganalisis struktur perekonomian di suatu wilayah. Hal yang utama dari analisis SS ini adalah diketahuinya berbagai indikator kegiatan ekonomi suatu wilayah pada dua waktu yang berbeda (Muta'ali, 2015). Analisa SS dihitung berdasarkan rumus:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

$$D_{ij} = E_{ij.rn} + E_{ij} (rin-rn) + E_{ij} (rij-rin)$$

Keterangan:

D_{ij} = Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota)

N_{ij} = Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi wilayah acuan (provinsi/nasional)

M_{ij} = Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor i wilayah acuan (provinsi/nasional)

C_{ij} = Perubahan PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor i tersebut di wilayah amatan (kab/kota)

E_{ij} = PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) tahun awal analisis

E_{in} = PDB sektor/subsektor i di wilayah acuan (provinsi/nasional) tahun awal analisis

E_n = PDRB total wilayah acuan (provinsi/nasional) tahun awal analisis

E_{ij,t} = PDRB sektor/subsektor i di wilayah amatan (kab/kota) tahun akhir analisis

E_{int} = PDB sektor/subsektor i di wilayah acuan (provinsi/nasional) tahun akhir analisis

E_{nt} = PDRB total wilayah acuan (provinsi/nasional) tahun akhir analisis

Sumber: Muta'ali (2015)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi sektor basis yang dilihat dari nilai PDRB secara *time series* bertujuan untuk melihat sektor mana sajakah yang menjadi sektor basis dan non basis di Kabupaten Blitar. Hasil identifikasi nilai PDRB Kabupaten Blitar secara seri waktu dengan menggunakan analisis LQ ditampilkan pada Tabel 2. Hasil perhitungan LQ pada Tabel 2 menyimpulkan bahwa lapangan usaha yang menjadi sektor basis di Kabupaten Blitar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Jenis komoditas yang menjadi sektor basis di Kabupaten Blitar adalah berturut-turut

peternakan dan tanaman pangan. Sektor basis diartikan dapat memenuhi kebutuhan kab/kota setempat dan dapat melakukan ekspor ke wilayah lain. Seperti diketahui, sumbangan subsektor peternakan mencapai Rp. 4.821.093 juta atau berkontribusi sebesar 48% dari keseluruhan sumbangan subsektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Blitar tahun 2016.

Subsektor peternakan yang berkembang di Kabupaten Blitar meliputi sapi (sapi perah, sapi pedaging, kerbau, kuda, dll) sedangkan jenis unggas meliputi ayam petelur dan pedaging, itik, dan kelinci. Namun saat ini tengah dibangun peternakan sapi perah PT. Greenfileds Indonesia di Kecamatan Wlingi dengan jumlah sapi perah sebanyak 10 ribu ekor.

Tabel 2. Indeks LQ Kabupaten Blitar

No.	Lapangan Usaha	Tahun							Rata-rata
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,7	2,6
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9	1,1	1,1	0,9
3.	Industri Pengolahan	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
5.	Konstruksi	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
6.	Transportasi dan Pergudangan	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
7.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8.	Informasi dan Komunikasi	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
9.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9
10.	Real Estate	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
11.	Jasa Perusahaan Administrasi Pemerintahan,	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
12.	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
13.	Jasa Pendidikan	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
15.	Jasa lainnya	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Sumber : Data diolah (2018)

Saat ini total produksi susu sapi segar di Kabupaten Blitar hanya mencapai 32.818 liter/tahun. Dengan hadirnya PT. Greenfields Indonesia diharapkan mampu menghasilkan susu sapi segar sebanyak 50 juta liter/tahun dan mendongkrak perekonomian peternak sapi perah.

Sektor basis berikutnya adalah subsektor tanaman pangan yang meliputi padi, jagung, ketela. Subsektor tanaman pangan mampu menyumbang sebesar 24% terhadap keseluruhan kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Blitar dalam PDRB tahun 2016. Panen gabah kering rata-rata mencapai 117,51 kw/Ha dengan luas panen mencapai 64.998 Ha. Sedangkan komoditas jagung paling banyak dikembangkan di Kecamatan Bakung, Panggungrejo, dan Talun. Luas panen komoditas jagung di Kabupaten Blitar mencapai 50.462 Ha dengan rata-rata panen mencapai 34,14 kw/Ha.

Jumlah produksi komoditas telur ayam ras menjadi sektor basis yang tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam Kabupaten Blitar sendiri namun dapat memenuhi sebesar 70% kebutuhan Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat dibuktikan bahwa total nilai produksi telur ayam ras di Kabupaten Blitar mencapai Rp. 3.019.822,7 juta, mendominasi sumbangan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB Kabupaten Blitar tahun 2016. Komoditas berikutnya yang menjadi sektor basis adalah sapi potong dengan total nilai produksi sebesar Rp. 1.896.190,2 juta pada tahun 2016.

Teknik analisis DLQ menemukan bahwa ada empat lapangan usaha yang memiliki prospek

menjadi sektor basis di masa yang akan datang, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi. Perhitungan $DLQ > 1$ menunjukkan bahwa proporsi laju pertumbuhan di keempat lapangan usaha tersebut pada PDRB Kabupaten Blitar lebih cepat daripada pertumbuhan lapangan usaha yang sama pada PDRB Provinsi Jawa Timur, yang paling tinggi pertambangan dan penggalian (1,28).

Kabupaten Blitar memiliki potensi tambang Golongan B dan C sangat menjanjikan terutama terdapat di selatan apabila dapat di dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal. Kegiatan pertambangan di kabupaten ini ada di dua lokasi yakni di Blitar utara dan selatan. Kegiatan di Blitar utara khusus kegiatan penambangan mineral sirtu berada di kantong lahar Gunung Kelud (Kali Badak, Kali Putih, Kali Semut, dan Kali Lekso). Sedangkan kegiatan penambangan di Kabupaten Blitar selatan terdiri dari tambang feldspar, bentoit, zeolit, clay, batu gamping, onyx dan pasir besi.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian memperoleh perhatian yang lebih besar mengingat Kabupaten Blitar memiliki deposit bahan galian yang besar dan mempunyai potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menopang pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataan dari sekian potensi yang ada baru sebagian yang bisa dieksplorasi, namun belum dikelola secara profesional sehingga hasilnya tidak maksimal.

Tabel 3. Indeks DLQ Kabupaten Blitar

No.	Kategori	Indeks DLQ
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,01
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,28
3.	Industri Pengolahan	0,97
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,89
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,86
6.	Konstruksi	0,99
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,05
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,81
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,92
10.	Informasi dan Komunikasi	0,96
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15
12.	Real Estate	0,96
13.	Jasa Perusahaan	0,88
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,95
15.	Jasa Pendidikan	0,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,95
17.	Jasa lainnya	1,00

Sumber : Data diolah (2018)

Tabel 4. Perhitungan *Shift-Share* Kabupaten Blitar

Lapangan Usaha	Nij	Ps	Ds	Nilai SS
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.394.303	-1.058.005	3.300.096	4.636.394
Pertambangan dan Penggalian	311.629	-22.100	189.508	479.038
Industri Pengolahan	923.453	-31.501	680.565	1.572.517
Pengadaan Listrik dan Gas	5.274	-5.296	2.786	2.764
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.884	-1.021	518	2.381
Konstruksi	589.770	-6.703	713.987	1.297.054
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.100.067	138.921	1.249.399	2.488.388
Transportasi dan Pergudangan	82.013	19.474	58.766	160.253
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	56.068	18.752	57.150	131.969
Informasi dan Komunikasi	367.478	217.355	-9.964	574.868
Jasa Keuangan dan Asuransi	112.089	71.011	233.409	416.509
Real Estate	128.790	22.044	65.427	216.261
Jasa Perusahaan	24.929	-1.094	14.084	37.920
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	265.995	-143.015	194.882	317.862
Jasa Pendidikan	271.509	53.433	208.422	533.364
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	46.415	32.249	28.382	107.046
Jasa Lainnya	102.867	-29.521	74.133	147.479
PDRB	6.785.532	-725.017	6.336.534	12.397.049

Sumber: Data diolah (2018)

Laju pertumbuhan pertambangan dan penggalian di tingkat Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 15% yang berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhannya. Penyebab turunnya kontribusi ini disebabkan karena permintaan bahan galian terutama batubara mengalami penurunan yang drastis. China sebagai importir batubara juga mengurangi impor batubara sebagai akibat dari perlambatan pertumbuhan ekonominya.

Penyebab kedua adalah nilai komoditas batubara menurun tajam sehingga tidak ada kontribusi yang berarti pada tahun 2015. Sedangkan di satu sisi, laju pertumbuhan kategori ini pada tahun 2014 meningkat menjadi 19%. Kenaikan ini disebabkan karena meningkatnya harga pasir besi di pasaran internasional yang mencapai Rp 350.000/ton (pada saat itu).

Berdasarkan analisis SS diketahui bahwa selama kurun waktu 2010-2016, PDRB Kabupaten Blitar mengalami penambahan kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp. 12,39T. Hal ini dapat dilihat dari nilai SS yang positif pada semua lapangan pekerjaan. Kenaikan

kinerja perekonomian Kabupaten Blitar disumbangkan oleh empat lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan konstruksi. Pertumbuhan ekonomi di tingkat Provinsi Jawa Timur menunjukkan pengaruh pertumbuhan terhadap perekonomian Kabupaten Blitar pada setiap lapangan usaha dengan total nilai output Rp. 6,78T.

Sedangkan lapangan usaha yang kurang kompetitif/memiliki daya saing yang lebih rendah di tingkat Provinsi Jawa Timur adalah informasi dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan indeks $DLQ < 1$. Selebihnya lapangan usaha lainnya memiliki daya saing terhadap wilayah yang lebih luas (Provinsi Jawa Timur) dicirikan dengan nilai $Ds > 1$.

Nilai pergeseran proporsional (Ps) menunjukkan bahwa lapangan usaha di Kabupaten Blitar yang memiliki laju pertumbuhan lebih lambat (Ps negatif) daripada Provinsi Jawa Timur adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan

listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa lainnya.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Blitar secara keseluruhan lebih lambat daripada laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur. Lapangan usaha yang memiliki nilai Ps positif (laju pertumbuhan lebih cepat) daripada Provinsi Jawa Timur adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; informasi dan komunikasi; real estate; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial di Kabupaten Blitar menjadi sektor basis pada tahun 2010-2016. Sedangkan lapangan usaha yang memiliki daya saing adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan jasa keuangan dan asuransi. Selama periode tahun 2010-2016 struktur perekonomian Kabupaten Blitar ditopang oleh empat lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; industri pengolahan; dan konstruksi.

REKOMENDASI

1. Pengembangan potensi ekonomi (sektor basis) diperlukan konsistensi dan sinergitas antar lembaga sehingga tercipta sebuah program perbaikan kesejahteraan masyarakat yang multisektoral dan komprehensif.
2. Kerjasama antar lembaga terutama instansi pemerintah sebagai regulator diperlukan dalam membuat tata aturan/produk kebijakan yang mengikat tidak hanya antar instansi pemerintah itu sendiri tetapi juga kepada pihak ketiga, terlebih lagi dapat mengakomodir munculnya lembaga NGO yang berorientasi non profit. Pihak ketiga inilah yang seringkali berada di garis depan, lebih cepat dalam mengatasi setiap perubahan yang terjadi di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan kesempatan dan dukungan baik moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada rekan-rekan sejawat Peneliti di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan masukan dan saran terkait perbaikan mutu kualitas dan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin. 2016. Integrasi Ekonomi dan Lingkungan Hidup dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. *Jurnal EduTech* 2(1) hal. 11-17.
- Lukito, O. 2008. Potensi Pesisir Selatan Jawa Timur [Online]. Dari: <https://okilukito.wordpress.com/2008/09/22/potensi-pesisir-selatan-jawa-timur/> [Diakses: 28 Juli 2017]
- Cahyono, S.A, Wahyu Wisnu Wijaya. 2014. Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Sub DAS Bengawan Solo Hulu. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 11(1) hal. 32-43
- Hamid, A. 2014. Potensi Investasi Jalur Lintas Selatan di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Bina Praja* 6(3) hal. 97-204
- Hamidah, B.I.N, Fitriana Zahroh. 2017. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Timur Kabupaten/Kota Menurut Lapangan Usaha 2012-2016*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Jawa Timur.
- Huda, M, Eko Budi Santoso. 2014. Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan Potensi Daerahnya. *JURNAL TEKNIK POMITS* 3(2) 81-86
- Husna, N, Irwan Noor, Mochammad Rozikin. 2013. Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1(1) hal. 188-196
- Islami, F.S. 2018. Faktor-faktor Mempengaruhi Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa timur, Indonesia. *Jurnal MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN* 33 (1) hal 29-39
- Iswanto, D. 2015. Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal SIGNIFIKAN* 4(1) hal 41-66
- Julianto, P.A. 2016. Dinilai Strategis, Menperin Optimalkan Kawasan Industri Nasional. [Online]. Dari: <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/08/05/110000026/Dinilai.Strategis.Menperin.Optimalkan.Kawasan.Industri.Nasional>. [Diakses: 25 Februari 2019]

- Kasanah, K.N. 2017. Kebijakan Berbasis Penelitian. [Online]. Dari: <http://setKabupatengo.id/kebijakan-berbasis-penelitian/> [Diakses: 7 Agustus 2018]
- Muta'ali, L. 2015. *Teknik Analisis Regional, untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Pratiwi, N, Dwi Budi Santosa, Khusnul Ashar. Analisis Implementasi Pembangunan Berkelanjutan di Jawa Timur. *JIEP* 18(1) hal. 1-14
- Provinsi Jawa Timur. 2015. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur 2015*. Surabaya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- Qomariyah, S, Mustapit, Agus Supriono. 2018. Analisis Potensi Wilayah Berbasis Komoditas Pertanian Tanaman Pangan serta Kontribusinya terhadap Perekonomian Kabupaten Bondowoso. *JSEP* 11(1) hal. 66-72
- Santoso, S.H. 2015. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi Wilayah di Satuan Wilayah Pembangunan IV Propinsi Jawa Timur. *Media Trend* 10(2) hal. 116-128
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukwika, T. 2018. Peran Pembangunan Infrastruktur terhadap Ketimpangan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan* 6(2) hal. 115-130
- Sutikno, dan Maryunani. 2007. Analisis Potensi dan Daya Saing Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Kabupaten Malang. *Journal of Indonesian Applied Economics* 1(1) hal.1-17
- Sholikhah, W. 2013. Analisis Pembangunan Pertanian Berkelanjutan melalui Agribisnis di Kawasan Blitar Selatan. Jurnal tidak diterbitkan. Malang: Pendidikan Pascasarjana Geografi Universitas Negeri Malang.
- Wahyudi, W.W, Dominicus Savio Priyarsono, Amzul Rifin. 2014. Perencanaan Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Kasus: Kabupaten Pasaman Pasca Otonomi Daerah. *Jurnal Agribisnis Indonesia* 2(2) hal. 159-176
- Wiratama, S, Herman Cahyo Diartho, Fajar Wahyu Prianto. 2018. Analisis Pembangunan Wilayah Tertinggal di Provinsi Jawa Timur. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* V(1) hal. 16-20
- Wilonoyudho, S. 2009. Kesenjangan dalam Pembangunan Kewilayahan. *Forum Geografi* 23(2) hal. 167-180
- Yulianto, D.Y, dan Eko Budi Santoso. 2013. Identifikasi Potensi Komoditas Unggulan pada Koridor Jalan Lintas Selatan Jatim di Kabupaten Tulungagung-Trenggalek. *JURNAL TEKNIK POMITS* 2(2) hal. 118-122